



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ASTERA PRIMANTO BHAKTI**
2. Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL**
3. NHK : **116120**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **9.687.380.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 254 m²/240 m² di KAB / KOTA MALANG, Rp. 760.948.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 178 m²/45 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 421.874.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 176 m²/225 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , Rp. 2.523.048.000
4. Tanah Seluas 16.443 m² di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 394.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 580 m²/400 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 4.269.340.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 294 m²/138 m² di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.318.170.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **650.100.000**

1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 900.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 700.000
3. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000



4. MOBIL, TOYOTA CAMRY SEDAN Tahun 2011, HASIL SENDIRI		
Rp. 80.000.000		
5. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2019, HASIL SENDIRI		
Rp. 8.500.000		
6. MOBIL, SUZUKI KATANA JEEP Tahun 1997, HASIL SENDIRI		
Rp. 30.000.000		
7. MOBIL, TOYOTA ALPHARD MINIBUS Tahun 2015, HASIL		
SENDIRI Rp. 450.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.957.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	9.791.336.400
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.200.179.831
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	24.285.996.231
III. HUTANG	Rp.	34.561.001
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	24.251.435.230

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.